

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DINAS SOSIAL PPPA KOTA MADIUN 2024**

**PPID KOTA MADIUN**

<b>NO</b>	<b>JENIS INFORMASI</b>	<b>DASAR HUKUM</b>	<b>BADAN PUBLIK</b>	<b>BATAS WAKTU PENGECUALIAN</b>	<b>AKIBAT JIKA DIBUKA</b>	<b>AKIBAT JIKA DITUTUP</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Data Pribadi Penerima Bantuan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tansaksi Elektronik;</li> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</li> <li>- Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.</li> </ul>	Dinas Sosial PPPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selama statusnya berhak mendapat bantuan kemiskinan</li> <li>• Informasi yang dapat dibuka hanya nama dan alamat penerima bansos</li> <li>• Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penerima bantuan sosial, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin;</li> <li>• Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data pribadi penerima bantuan sosial; Informasi yang dapat dibuka hanya nama, pekerjaan dan alamat penerima bansos</li> </ul>	Membuka rahasia pribadi ndan bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab	Kerahasiaan hak dan perlindungan hak pribadi
2.	Data Identitas PMKS di Penampungan sementara/ shelter Srintit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;</li> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> </ul>	Dinas Sosial PPPA	7 hari kecuali bila tidak ada keterangan dan sakit bisa diperpanjang	Akan menentukan asal usul PMKS tersebut diketahui	Kerahasiaan pribadi terlindungi
3.	Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang</li> </ul>	Dinas Sosial PPPA	Selama berstatus anak	Membuka rahasia anak dan berdampak pada kejiwaan dan masa depan	Perlindungan hak-hak anak dan memberi ruang gerak pada anak

		Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.				
4.	Data Identitas Klien UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h;</li> <li>- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu.</li> </ul>	Dinas Sosial PPPA	Selama peraturan belum dicabut	Merampas hak asasi klien	Permasalahan bisa segera diatasi tanpa membuka aib klien
5.	Data calon pemenang lomba kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 14 Tahun 2006 Pasal 17 tentang keterbatasan informasi publik</li> <li>2. Permendagri Nomor 26 Tahun 2009</li> </ol>	Dinas Sosial PPPA	Sampai diumumkan pemenangnya	Mempengaruhi jalannya penjurian	Penjurian/ penilaian berjalan lancar
6.	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode x sangat rahasia (SR) dan rahasia ( R ) dan Konfidensial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</li> <li>- Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf i.</li> </ul>	Dinas Sosial PPPA	Hingga proses surat tersebut selesai	Menghambat kebijakan pimpinan	Menjaga kerahasiaan data pemerintah
7.	Arsip dinamis yang menyangkut dokumen SPJ keuangan kegiatan yang belum diaudit oleh BPK pada tahun berjalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;</li> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i.</li> </ul>	Dinas Sosial PPPA	Terbatas sampai setelah selesai audit	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen
8.	Laporan keuangan (LK) yang belum diaudit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf i dan pasal 3 huruf e;</li> <li>- Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.</li> </ul>	Dinas Sosial PPPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatas sampai setelah selesai audit</li> <li>• Dapat dibuka setelah laporan keuangan tersebut diaudit.</li> </ul>	Informasi belum terjamin kebenarannya -Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.	Membantu badan publik dalam penyusunan kebijakan - Melindungi kerahasiaan laporan keuangan yang masih memerlukan audit dari pihak terkait
9.	Dokumen penawaran Kontrak Pengadaan barang dan Jasa yang pelaksanaannya masih	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;</li> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang</li> </ul>	Dinas Sosial PPPA	Selama proses pengadaan barang dan jasa	- Mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat	-Bisa menjadi ketidakakuratan dan obyektifitas dalam penilaian

	dalam proses	<p>Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;</li> <li>- Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.</li> </ul>				
10.	Kode akses / user / Password aplikasi Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17;</li> </ul>	Dinas Sosial PPPA	Selama password/kode berlaku/masih dipergunakan	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh hacker yang tidak bertanggung jawab.

Madiun, 12 Februari 2024

Mengetahui,

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKOTA MADIUN**



**HERI SUWARTONO, S.Sos., M.Si.**

**Pembina Utama Muda**

**NIP 197205051991011002**